

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik dan terstruktur. Di era reformasi ini, terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan salah satu tujuan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa bernegara. Tidak hanya di pemerintah pusat, pemerintah daerah pun diharapkan dapat mewujudkan kinerja yang baik. Dalam mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya perbaikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya dapat berguna bagi para pengguna atau *stakeholder*, terutama transparansi kepada masyarakat.

Laporan keuangan pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat, DPRD, dan masyarakat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemakai. Laporan keuangan pemerintah disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah (Bastian, 2010:336).

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala instansi pemerintah daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Salah satu bentuk keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangannya dapat dinilai dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dihasilkan. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (Suhardjo dan Adhi, 2013).

Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Standar Pengendalian Internal Pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian berarti laporan tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengambil keputusan oleh para pemakai laporan keuangan. Selain itu, penerapan sistem pengendalian intern dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai metode untuk dapat mengawasi dan memberikan keyakinan tercapainya tujuan suatu organisasi menjadi penting, sehingga hal-hal yang telah direncanakan dapat terlaksana. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari beberapa unsur, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

Menurut Arens (2008:370), jika pengendalian intern tersebut terimplementasikan dengan efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang dihasilkan andal, aset milik daerah tetap aman dan peraturan perundang-undangan yang dijalankan efektif maka akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga, sistem pengendalian intern merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan menjadi lebih andal. Isu tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) mendapat perhatian yang cukup besar belakangan ini dari BPK selaku auditor eksternal selalu menguji kekuatan SPI di setiap pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan luas lingkup pengujian yang dilaksanakannya. Apabila Pemerintahan memiliki sistem pengendalian internal yang lemah, maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak diyakini kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Fenomena menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palembang telah meraih delapan kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan juga Pemerintah Kota Palembang tercepat kedua dalam mengumpulkan laporan keuangan (djpb.kemenkeu.go.id).

Hal ini dapat diartikan bahwa dari hasil data tersebut kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang sangat baik dan transparan sehingga Pemerintah Kota Palembang sudah meningkatkan laporan keuangannya sehingga berhasil meraih WTP.

Tabel 1.1
Perkembangan LKPD Kota Palembang

Tahun anggaran	Opini yang diperoleh dari BPK
2010	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2011	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2012	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2013	Wajar tanpa pengecualian (WTP)
2014	Wajar tanpa pengecualian (WTP)
2015	Wajar tanpa pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2010-2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa opini BPK terhadap LKPD Kota Palembang mengalami peningkatan sejak tahun 2010 sampai 2017. LKPD Kota Palembang mendapat opini WTP, tentunya mendapat opini WTP selama 8 tahun berturut-turut merupakan suatu prestasi bagi Pemerintah Kota Palembang. Kemudian hal yang membuat penulis tertarik untuk meneliti Sistem Pengendalian Intern adalah terdapat kasus di BPKAD Kota Palembang dimana dua orang oknum pegawainya ditetapkan oleh Jasa Penuntut Umum (JPU) sebagai tersangka pada tahun 2016 terkait dengan kasus korupsi sebesar Rp 310 juta atas penyimpangan dana pengadaan lift di BPKAD Kota Palembang sebagaimana dilansir dalam situs Detik News. Dengan adanya kasus tersebut maka dapat dikatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern yang dijalankan masih belum maksimal. Maka, kompetensi aparatur yakni sumber daya manusia belum secara maksimal dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dapat

meminimalisir kesalahan yang dibuat oleh pegawai dalam proses penyusunan laporan keuangan. Hal inilah yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Aparatur dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan sehingga laporan keuangan pemerintah daerah Kota Palembang bisa mendapat opini WTP.

Dalam pengelolaan keuangan yang baik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten yang dilatar belakangi pendidikan akuntansi atau keuangan (Windiastuti, 2013). Dalam suatu organisasi terutama organisasi pemerintah daerah, upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak bisa terlepas dari adanya unsur sumber daya manusia sebagai penggerak jalannya organisasi. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia berkualitas untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur OPD dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar (Andini dan Yusrawati, 2015). Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah daerah harus memberikan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Pemerintah daerah sangat membutuhkan PNSD yang profesional dengan wawasan yang luas, memiliki kompetensi di bidangnya dan memiliki jiwa berkompetensi. Dengan kompetensi yang dimilikinya, PNSD dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. PNSD yang berkualitas dan berkompetensi dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi suatu hal utama untuk dapat tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini berarti kualitas PNSD di bidang akuntansi (keuangan) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah (Daniel, 2013).

Kapasitas sumber daya manusia yang memadai, jika tidak didukung dengan teknologi informasi belum tentu dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal. Agar menunjang laporan keuangan yang andal, akuntabel, dan transparan maka diperlukan suatu Teknologi Informasi untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teknologi yaitu sistem untuk melakukan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal (*Hardware dan Software*) seolah-olah memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera dan otak manusia, sedangkan informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian atau penataan dari sekedar kelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan bagi penggunanya (Sutabri, 2014:2).

Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam aplikasi komputer akuntansi pada lingkup pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam membantu pejabat pengelola keuangan OPD maupun PPKD dalam menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual dengan efektif, efisien, dan ekonomis.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Yunita (2015) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adhitama (2017) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2018) tentang pemanfaatan teknologi informasi yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu :

“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Aparatur dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”
(Studi Kasus Pada BPKAD Kota Palembang).

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah kompetensi aparatur secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah sistem pengendalian intern, kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 BATASAN MASALAH

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, peneliti hanya membatasi pembahasannya yaitu pada pengaruh sistem pengendalian intern, kompetensi aparatur, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun unit penelitian ini adalah Kabid Akuntansi dan Pelaporan, Kassubid Akuntansi dan Pelaporan, Kassubid Akuntansi dan Pendapatan, Kassubid Akuntansi dan Administrasi Belanja Pegawai, Kasubag Keuangan, Staf Akuntansi dan Pelaporan, Staf Perencanaan dan Pelaporan, dan Staf Keuangan di instansi BPKAD Kota Palembang.

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Aparatur, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikarenakan memiliki manfaat yaitu :

1. Bagi Penulis
Untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam peningkatan kemampuan berpikir dan membuat suatu karya tulis di bidang ilmiah.
2. Bagi Akademis
Sebagai kerangka ilmiah untuk melakukan suatu penelitian selanjutnya dan sebagai acuan terhadap teori-teori yang sudah ada.
3. Bagi Pemerintah
Dapat memberikan informasi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan sehubungan dengan peningkatan Kualitas Laporan Keuangan.